



RENCANA KERJA Tahun 2024 PERUBAHAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Adi Sucipto KM. 15,2 Telp. (0561) 725546 Email: dkumppkkr@gmail.com
SUNGGAI RAYA

Jalan Adisucipto KM. 15,2 Telp/Fax. (0561) 725546 Kode Pos 78391
Email : dkukmpkkr@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) 2024 Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) 2024 Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya selama satu tahun memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) 2024 Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) 2024 Perubahan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) 2024 Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang

Sungai Raya,

2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya

Dr. M. Norasari Arani
Pembina Utama Muda
NIP.19630810 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan	8
BAB.II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	39
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	40
3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan	41
BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB.IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Sejalan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang didukung dengan kemitrologian di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan , hal inipun telah ditegaskan sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dimana Pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan salah satu urusan wajib, dan Pembangunan Perdagangan dan perindustrian menjadi urusan pilihan.

Berdasarkan dengan hal tersebut telah ditetapkan pula Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 khusus untuk Bidang Ekonomi yaitu:

- 1) Menciptakan Bangsa yang berdaya saing
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Berdasarkan kedua misi tersebut maka kerangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada:

- 1) Pengembangan UKM yang berbasis iptek dan berdaya saing
- 2) Memberdayakan Koperasi melalui peningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya

- 3) Memberdayakan Usaha Mikro melalui peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Tentu saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota khususnya Dinas/Institusi yang berperan dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten Termuda di Kalimantan Barat, tercatat telah memiliki Koperasi sebanyak 515 unit yang tersebar pada 9 kecamatan, namun jumlah tersebut masih harus dikonfirmasi ulang ke lapangan karena diperkirakan masih terdapat koperasi lama yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya. Koperasi di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 5 jenis Koperasi yaitu : Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa dan Koperasi Pemasaran.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut di atas maka pembangunan/pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan benar dan terencana yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Melalui laporan ini kami akan memuat Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja 2024 Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu kepada peraturan pusat dan daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya

Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 104);
30. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya setiap tahun agar dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, efisien dan efektif sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai antara lain untuk :

- 1) Melaksanakan Program dan Kegiatan tepat waktu.
- 2) Mempercepat capaian target sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Mensikronkan Kebijakan Pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

- 4) Melanjutkan pembangunan Koperasi dan UMKM yang pada tahun sebelumnya belum mencapai output optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja SKPD

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN SKPD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

Untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Perubahan dapat dilakukan dengan mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2024, maka ditetapkan indikator-indikator dengan katagori sebagai berikut:

- Inputs (masukan)
 - Outputs (Keluaran)
 - Outcomes (Hasil)
 - Benefits (Manfaat)
 - Impacts (Dampak)
- 1) Indikator Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.
 - 2) Indikator Outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
 - 3) Indikator Outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari suatu keluaran kegiatan.
 - 4) Indikator benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
 - 5) Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Indikator impacts ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2024 sebagian besar meliputi 3 jenis indikator kinerja yaitu Inputs, outputs dan outcomes, sedangkan indikator benefit dan impacts baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitan dengan tugas dan sasaran Pengukuran kinerja disajikan pada formulir Pengukuran kinerja kegiatan /PKK.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

- 1) Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- 2) Tingkat Pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat Pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumberdaya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Tingkat capaian Kinerja				Keterangan
		SB	B	CB	TB	%
1	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, peningkatan kualitas pelayanan satuan kerja dan pendukungnya serta manajemen bagi peningkatan kinerja personal.		V			76,08
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dengan dukungan sarana dan prasarana meningkatkan dengan sistem penatausahaan keuangan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam pelaksanaan penyusunan maupun pelaporan keuangan.	V				96,95
3	Terwujudnya kelembagaan Koperasi dan UMKM yang tangguh, profesional dan konsisten oleh kegiatan usaha anggota sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kepada anggota dan masyarakat.	V				84,49
4	Terwujudnya pelaksanaan pelatihan SDM dalam upaya menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi UMKM	V				96,68
5	Terwujudnya dukungan melalui pengembangan usaha dan permodalan serta promosi produk usaha Koperasi dan UMKM	V				97,61
6	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam upaya menjadikan Koperasi dan UMKM menjadi lembaga ekonomi produktif yang mandiri dan profesional.	V				99,53

Keterangan: SB = Sangat Baik
CB = Cukup Baik

B = Baik
TB = Tidak Baik/Buruk

Dengan memperhatikan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2024 untuk mencapai beberapa tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kebijakan dan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan sasaran yang dicapai. Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, nilai pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun untuk 2024 adalah APBD tahun 2024 sebesar Rp. 6.872.466.150,- (*Laporan Keuangan Tahun 2024*).

Rincian realisasi anggaran tersebut meliputi :

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Retribusi Daerah Pagu Anggaran sebesar Rp. 0,-.

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja Pegawai Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.822.466.150,-

- Belanja Barang dan Jasa Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.172.445.053,-.
- Belanja Hibah Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pagu Anggaran Sebesar Rp. 0,-

(**Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2024**)

Untuk mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah:

- 1) Peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama sarana mobilitas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyebar di wilayah kabupaten Kubu Raya.
- 2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk peningkatan kinerja.
- 3) Ketersediaan dana untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk peningkatan kinerja.
- 4) Profesionalisme aparatur dan jabatan struktural untuk memperlancar kegiatan sehari-hari.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Raelisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5 + 7 + 9)	11(10 / 4)
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
01201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
0120101	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen RKA, DPA, DPP	8 dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	14 Dokumen	82%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen							
0120106	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	175%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan							
0120107	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen							
01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
0120201	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	100%	40 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	74%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan							
0120205	2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan							
0120207	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	1 Dokumen	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	27 Laporan	169%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan							
01###	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
01020502	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0 -	-	0 -	0 -	0 %	2 Paket	2 Paket	50%
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket							
01020509	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	-	-	0 %	- -	0	0%
01020510	3 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	1 dokumen	-	-	0 %	-	-	0%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen							
01020511	4 Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	12 Orang	6 orang	0 -	0 -	0 %	-	-	0%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang							

01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	2 Paket	1 Paket	89 Paket	89 Paket	100%	12 Paket	102 Paket	680%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	13 Paket								
01 2.06 04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	4 Tahun	2 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Paket	26 Paket	650%	
		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14 Paket								
01 2.06 05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	2 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Paket	25 Paket	96%	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	24 Dokumen								
01 2.06 06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	2 Tahun	1 Tahun	375 Eksemplar	375 Ekssemplar	100%	375 Dokumen	751 Dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	376 Dokumen								
01 2.06 09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	100%	119 Laporan	132 Laporan	54%	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dihadiri									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan								
01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	90 Unit	18 Unit	13 Unit	13 Unit	100 %	12 Unit	43 Unit	248 %	
01 2.07 02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 tahun	1 Tahun	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	1 Unit	13%	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit								
01 2.07 05	2 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	4 unit	2 Unit	3 Set	3 Set	100%	2 Unit	7 Unit	88%	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit								
01 2.07 06	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 unit	8 Unit	10 unit	10 Unit	100%	9 Unit	27 Unit	123%	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit								
01 2.07 10	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 unit	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	7 Unit	25%	
		Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit								
01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa	144	4 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100 %	24 Laporan	41 Laporan	113 %	
01 2.08 01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar yang dikirim	2 tahun	1 Laporan	-	-	0%	0 -	1 Laporan	50%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan								
01 02:08 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 tahun	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	25 Laporan	52%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan								
01 02.08 04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5 tahun	2 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Laporan	15 Laporan	10%	
		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan								
01 ###	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	395 Unit	20	41 -	41 -	100 %	107 Unit	168	178 %	
01 02:09 02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	8 unit	4 Tshun	1 Tahun	1 Tahun	100%	17 Unit	22 Unit	48%	
		Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit								
01 02:09 09	2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 paket	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	0 Unit	2 Unit	4%	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	50 unit								

01	02:09	10	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	24 unit	14 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	25 Unit	59 Unit	94%
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	39 unit							
01	02:09	11	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya	2 tahun	1 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	65 Unit	85 Unit	33%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	130 unit							
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 %	-	-	#DIV/0 !	100 %	40 Unit Usaha	2050 %	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	100 %	0 Unit Usaha	20 Unit Usaha 2000%
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi aktif dan sehat	20 Koperasi	10 Koperasi	0	0	0%	10 Unit Usaha	20 Unit Usaha 50%
					Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	20 Koperasi							
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPEREASI YANG SEHAT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang dinilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	70 Unit Usaha	70 %
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dapat penghargaan	100 koperasi	50 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	100%	10 Unit Usaha	70 Unit Usaha 70%
					Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	100 koperasi							
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI DIKLAT PERKOPERASIAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	160	100 %
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	80 Koperasi	40 Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	100%	60 Orang	160 Orang 100%
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 Koperasi							
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	63 %
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan perlindungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 Orang	63 %
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang direvitalisasi dan Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Koperasi	80 koperasi	40 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	30 Orang	100 Orang 63%
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	80 koperasi							
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE PELAKU USAHA MIKRO YANG DIBINA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	620	603 %
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	620	603 %
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mendapatkan Bantuan Permodalan	18 umkm	73 UKM	73 UKM	73 UKM	100%	50 Unit Usaha	196 Unit Usaha 166%
					Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang didata dan dilakukan pembinaan serta yang menerima bantuan permodalan	100 unit usaha							
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 unit usaha	79 UKM	79 UKM	100%	30 Unit Usaha	109 Unit Usaha 363%	

2	17	07	2.01	05	Koord inasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas	400 umkm	200 UMKM	100 UKM	100 UKM	100%	15 Orang	315 Orang	73%	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 orang									
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	100 unit usaha	50 Unit Usaha	0	-	0	-	0%	25 Unit Usaha	
						Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha								75 Unit Usaha
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMILIKI IZIN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Izin	3	20 Dokumen	Dokumen		Dokumen	0 %	100 %	20 Dokumen	25 %
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin	40 Dokumen	20 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0%	0 Dokumen	20 Dokumen	25%	
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen								
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar	-	0	24 Gudang	24 Gudang	100 %	36 Dokumen	60	1500 %	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen		24 Gudang	24 Gudang	100 %	36 Dokumen	60	1500%	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan untuk pelaku usaha	3	2 Dokumen	12 Kali	12 Kali	100 %	0 Dokumen	14 Dokumen	175 %	
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan terhadap bahan berbahaya	4 Dokumen	2 Dokumen	12 Kali	12 Kali	100%	0 Dokumen	14 Dokumen	175%	
						Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Dokumen								
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	10 Pasar	23 Paket	23 Paket	100 %	1 Unit	34 Unit	245 %	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	10 pasar	5 Pasar	23 Paket	23 Paket	100%	1 Unit	29 Unit	145%	
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 pasar								
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 unit	5 Pasar	0 -	0 -	0%	0 -	5	100%	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3		-	-	100 %	2 Dokumen	5 Dokumen	500 %	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Kecamatan	3 Kecamatan	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	500%	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KESTABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan pengawasan harga dan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting	24 lapran	12 Laporan	48 Kali	48 Kali	100%	12 Laporan	72 Laporan	150%	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24 lapran								
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	2 laporan	1 Laporan	0	-	0	-	0	25%	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	2 laporan								
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	100 %	1 Laporan	0	-	0	-	0 %	10	25 %
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	2 Laporan	1 Laporan	0	-	0	-	0	25%	
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Sumberdaya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 62 orang personil dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan komposisi kepangkatan sebagai berikut :

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV (Pembina)	5
2	Golongan III (Penata)	29
3	Golongan II (Pengatur)	2
4	Golongan I	-
5	Tenaga Honorer	24
	Jumlah	60

- 2) Berdasarkan Komposisi jabatan sebagai berikut :

No	Jenis eselon jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	3
5	Eselon IV b	1
6	Fungsional	14
7	Staff	12
	Tenaga Honorer	24
	Jumlah	60

- 3) Berdasarkan Komposisi pendidikan :

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (Magister)	7
2	Strata 1 (S-1)	36
3	D3	5
4	SLTA	12
	Jumlah	60

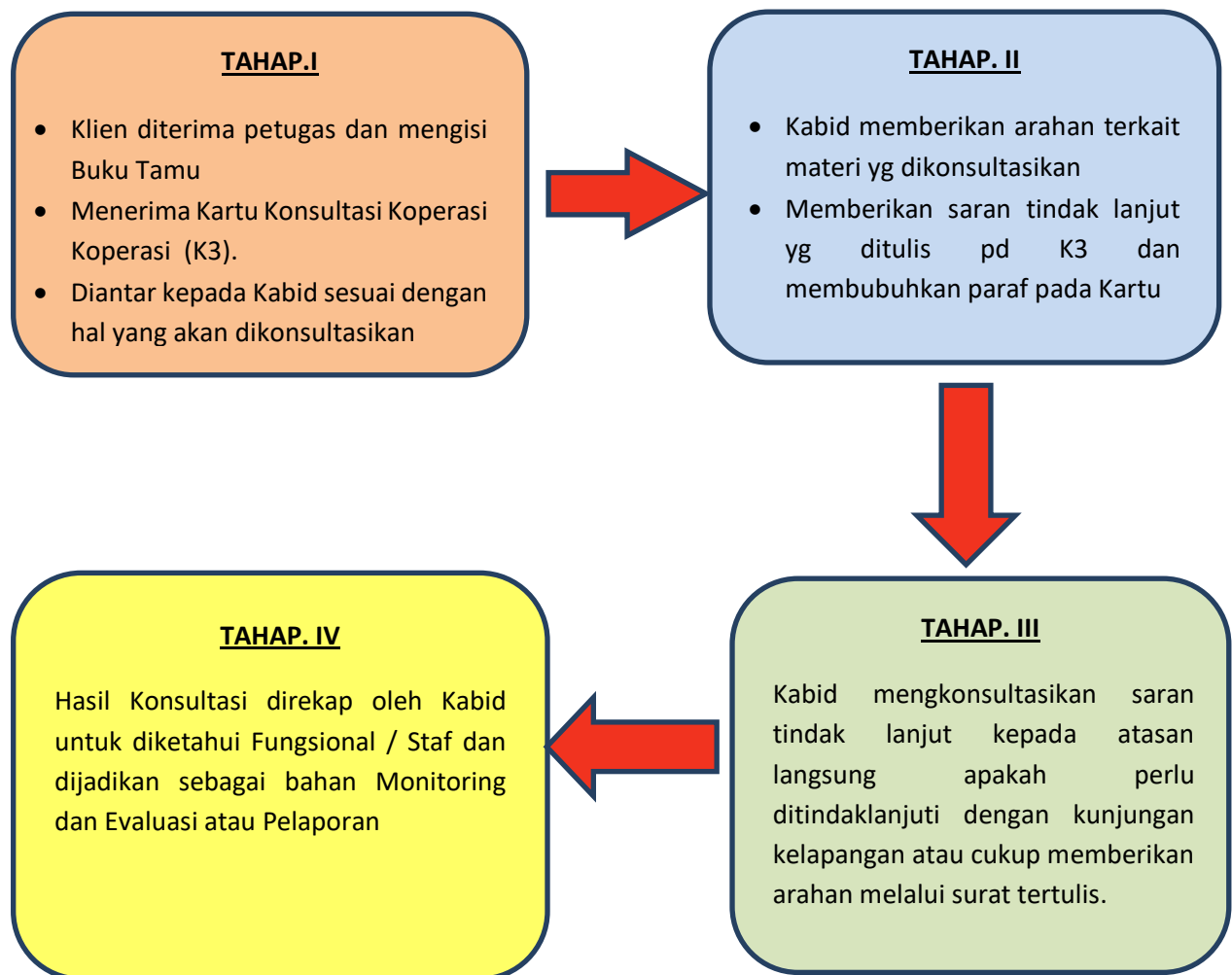
- 4) Manajemen Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada klien khususnya Gerakan Koperasi dan Pengusaha Mikro.

Sistem pelayanan menerapkan SOP (Standard Operasional Procedure).

Mekanisme pelaksanaan SOP adalah sebagai berikut :

Alur Pelayanan Terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian secara Umum (Pengurus/pengawas/karyawan) dan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Jenis pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Diklat
 - Pelayanan Pendirian Koperasi, Pengesahan Badan Hukum, Penggabungan/Peleburan/Pembubaran Koperasi.
 - Bimbingan Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

- Bimbingan Penyusunan Administrasi / Pembukuan Koperasi /Laporan Keuangan (Neraca/Rugi Laba, Buku Kas, Buku Bank, Persediaan, Inventaris Barang dll).
 - Pemeringkatan Koperasi /Penentuan Tingkat Kualitas Koperasi (Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang Berkualitas, Tidak Berkualitas)
 - Penilaian Koperasi Berprestasi / Penerima Award
 - Audit Koperasi (meliputi audit internal sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Akuntan Publik)
 - Advokasi terhadap Koperasi yang bermasalah / memiliki sengketa
 - Penyusunan Database Koperasi
- 2) Aspek Pemasaran dan Jaringan Usaha
- Pelayanan mendapatkan Label Halal, Merk Dagang, Barcode. Hak Patent atau hal – hal lain yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Memfasilitasi kegiatan promosi seperti: Pameran tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional , Bazar.
 - Pengadaan Brosur, Profil Produk UMKM, E-Commerce, dll.
 - Memfasilitasi terciptanya Jaringan Usaha Koperasi yang erat seperti: pembinaan terhadap Forda (Forum Daerah) UKM, mendekatkan UMKM dengan Pedagang Besar, Pedagang Pengumpul, Supermarket dan Exportir dll.
 - Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pasar Tradisional
- 3) Aspek Fasilitasi Permodalan.
- Menginformasikan sumber sumber permodalan bagi K-UMKM (Perbankan, Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), Corporate Social Responsibility (CSR), Bansos, KUR, Sertifikasi Hak atas Tanah dll).
 - Bimbingan Pembuatan Proposal Permodalan

- Mengidentifikasi Koperasi yang layak untuk memperoleh permodalan
 - Memproses kelengkapan usulan permodalan yang diajukan.
 - Melakukan Pengawasan/Monitoring terhadap Koperasi yang telah mendapatkan pinjaman dari LPDB, BUMN/BUMS, Perbankan, Bansos dll.
 - Menilai Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - Memfasilitasi pembukaan Kantor Cabang KSP/KJKS.
- 4) Aspek Kemitraan dan Pengembangan Usaha
- Memfasilitasi / membimbing Koperasi dan UMKM yang menjalin pola Kemitraan
 - Melakukan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Perusahaan dan Pengurus Koperasi, antara Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi selaku plasma.
 - Meningkatkan kualitas / mutu Produk K-UMKM agar dapat berdaya saing(penyempurnaan kemasan, kualitas rasa/design, pengenalan International Standard Organisation ISO, dll)
 - Menjalinkan kerjasama / kemitraan Koperasi dan UMKM dengan stakeholder(Dekopinwil,Dekopinda,KadinProv/Kab, Perusahaan selaku Bapak Angkat,BUMN/BUMD,Business Development Service)
 - Mengidentifikasi teknologi / mesin /alat yang dibutuhkan K-UMKM dalam proses produksi
 - Membentuk dan membina Sentra UKM di daerah
 - Mengidentifikasi produk unggulan daerah
 - Memperkenalkan OVOP (One Village One Product)
 - Memfasilitasi Program Wirausaha Pemula

Pelayanan terhadap Koperasi dan UMKM dilakukan setiap hari kerja di Kantor ataupun di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Palayanan SKPD
Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM		Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	60	14,00%	16,00%	18,00%	12,11%	18,50%	16,00%	18,00%	
			Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	60	40,00%	50,00%	60,00%	97	58,90%	50,00%	60,00%	
	Meningkatnya Pelaku IKM di Kabupaten Kubu Raya		Persentase IKM yang dibina	-	10,00%	10,00%	15,00%	52	52,00%	15,00%	20,00%	
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan		Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	15,00%	744	562	672	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	BB	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	
				71,50	71,50	71,50	71,50	68,00	68,00	71,50	71,50	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas

1) Isu – Isu Lingkungan Internal

Isu Strategis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam tataran nasional adalah kepada Peningkatan Daya Saing UMKM

1. Di Bidang Kemitraan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM.
 - a. Koperasi dan UMKM belum menjalin kemitraan yang optimal dengan Pengusaha Besar atau Stakeholder
 - b. Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan secara intensif.
 - c. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) atau Kontrak/Perjanjian Kerjasama.
 - d. Usaha yang dikelola belum memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga masih terdapat lahan tidur, limbah / bahan bekas yang terabaikan.
 - e. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk sentra.

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
 - Terjadinya monopoli
 - Munculnya distorsi dalam pasar
 - Usaha menjadi kurang efisien
2. Di Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
 - a. Penyebarluasan informasi pasar sangat terbatas
 - b. Peran Koperasi dalam pemasaran produk masyarakat masih lemah
 - c. Belum tersedianya Pusat Oleh-oleh di kawasan strategis

- d. Pelaku usaha terikat dengan pedagang tertentu
- e. Pengetahuan masyarakat tentang system pemasaran masih rendah
- f. Keuntungan Pedagang Perantara terlalu besar
- g. Penanganan pasca panen masih rendah
- h. Kemasan produk yang dijual masih sederhana

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah
- Tingkat pendapatan rendah
- Rantai pemasaran terhambat
- Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah

3. Di Bidang Kelembagaan dan Diklat Koperasi dan UMKM.

- a. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan perkoperasian, manajemen usaha kecil, akuntansi, kewirausahaan dll.
- b. Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM belum menerapkan metode partisipatif
- c. Sarana pelatihan masih terbatas
- d. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT
- e. Manajemen organisasi masih sederhana
- f. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap

Akibat/dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang professional.
- Tidak tertib dalam menjalankan administrasi.

4. Di Bidang Fasilitas Permodalan Koperasi dan UMKM

- a. Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Modal Koperasi dan UMKM terbatas.

- c. Pengurus Koperasi belum mampu membuat proposal yang standar.
- d. Belum ada kemauan pihak perbankan untuk membuka cabang di pelosok desa.

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Koperasi dan UMKM mengalami kesulitan
- Perkembangan usaha berjalan lamban
- Produktivitas usaha tidak meningkat.

2) Isu – Isu Lingkungan Eksternal

Isu – isu eksternal turut memicu bertambahnya permasalahan Koperasi dan UMKM antara lain;

- a. Dengan berlakunya AFTA (Asian Free Trade Area) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) maka produk lokal belum mampu bersaing karena harga produk impor lebih murah.
- b. Tingginya harga minyak dunia menjadikan kegiatan bisnis menjadi pemicu Highcost Economy.
- c. Resesi / krisis ekonomi dunia berdampak pada krisisnya perusahaan – perusahaan besar di Asia yang berpengaruh terhadap tingginya komponen-komponen / suku cadang bahan yang di impor Indonesia yang berpengaruh terhadap perusahaan di tanah air yang tergantung dengan peralatan impor tersebut.

Isu internal dan eksternal dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kubu Raya tentunya harus disikapi dan diatasi secara bertahap oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, Pemerintah Kabupaten telah melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas juga mempengaruhi pencapaian

target pembangunan di daerah menjadi tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan yang belum memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Mengingat permasalahan umum Pemerintah Daerah adalah terkait dengan aspek perekonomian seperti dilihat dari urusan Penanaman Modal, ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tetap mengacu pada Lima Program yaitu:

1. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi,
2. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif,
3. Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha bagi UMKM,
4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM,
5. Program Fasilitasi pengembangan UMKM,

Program-program tersebut untuk mengatasi isu-isu strategis dalam pembangunan daerah seperti pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan kerja yang tersedia serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. Pembangunan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap sektor unggulan komparatif wilayah.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2024
Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DKUMPP KKR	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Rp 5.282.734.071	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DKUMPP KKR	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Rp 5.246.773.597	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 35.962.823	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 22.852.487	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 21.815.729	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 10.582.903	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 6.940.126	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 6.271.456	
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 7.206.968	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 5.998.128	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 4.672.825.163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 4.664.353.715	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKUMPP KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	Rp 4.654.713.112	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKUMPP KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	Rp 4.654.713.112	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 11.140.633	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 5.868.496	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 6.971.418	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Rp 3.772.107	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 90.494.068	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 78.115.378	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKUMPP KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3.644.146	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKUMPP KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 3.644.146	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKUMPP KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 39.527.602	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKUMPP KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp 31.551.096	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKUMPP KKR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 8.011.320	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKUMPP KKR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 4.009.136	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 1.500.000	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	375 Dokumen	Rp 1.500.000	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp 37.811.000	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 37.411.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	Rp 392.162.017	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 Laporan	Rp 390.162.017	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 89.544.000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp 89.544.000	

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	302.618.017	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	55 Laporan	Rp	300.618.017		
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	121 Unit	Rp	91.290.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKUMPP KKR	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	31 Unit	Rp	91.290.000		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	DKUMPP KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp	80.570.000		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	DKUMPP KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Rp	80.570.000	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKUMPP KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Rp	5.840.000		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKUMPP KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Rp	5.840.000	
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKUMPP KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	Rp	4.880.000		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKUMPP KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Rp	4.880.000	
III		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DKUMPP KKR	Pesentase Koperasi yang Sehat	100 %	Rp	26.609.398		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DKUMPP KKR	Pesentase Koperasi yang Sehat	100 %	Rp	24.345.522		
1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang Dinilai	50 Unit usaha	Rp	26.609.398		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang Dinilai	10 Unit usaha	Rp	24.345.522		
	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	50 Unit usaha	Rp	26.609.398		1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit usaha	Rp	24.345.522	
IV		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DKUMPP KKR	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	100 %	Rp	19.873.686		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DKUMPP KKR	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	100 %	Rp	14.107.465		
1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keangotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pendidikann dan Pelatihan Perkoperasian	40 Orang	Rp	19.873.686		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keangotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pendidikanann dan Pelatihan Perkoperasian	30 Orang	Rp	14.107.465		
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DKUMPP KKR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	Rp	19.873.686		1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DKUMPP KKR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Rp	14.107.465	
V		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DKUMPP KKR	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	Rp	48.804.445		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DKUMPP KKR	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	Rp	48.037.457		
1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Unit Usaha	Rp	48.804.445		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	Rp	48.037.457		
	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarissi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	0 Orang	Rp	-		1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarissi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1 Orang	Rp	2.400.000	
	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit usaha	Rp	48.804.445		1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit usaha	Rp	45.637.457	
VI		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUMPP KKR	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang dibina	100 %	Rp	67.694.994		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUMPP KKR	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang dibina	100 %	Rp	61.982.465		
1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	DKUMPP KKR	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Difasilitasi	65 Unit Usaha/Orang	Rp	67.694.994		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	DKUMPP KKR	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Difasilitasi	16 Unit Usaha/Orang	Rp	61.982.465		
	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit usaha	Rp	-		1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit usaha	Rp	2.400.000	

	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15 Orang	Rp	25.000.050	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15 Orang	Rp	19.287.521	
	3	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	Rp	42.694.944	3	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	50 Unit Usaha	Rp	40.294.944	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DKUMPP KKR	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	100%	Rp	19.624.963	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DKUMPP KKR	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	100%	Rp	18.424.963		
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		DKUMPP KKR	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	50 Unit Usaha	Rp	19.624.963	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	DKUMPP KKR	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	50 Unit Usaha	Rp	18.424.963		
	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit usaha	Rp	19.624.963	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	DKUMPP KKR	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit usaha	Rp	18.424.963		
VIII	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		DKUMPP KKR	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin	100 %	Rp	134.912.825	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DKUMPP KKR	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin	100 %	Rp	121.111.685		
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		DKUMPP KKR	Jumlah Gudang yang terdaftar	0 Dokumen	Rp	134.912.825	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	DKUMPP KKR	Jumlah Gudang yang terdaftar	20 Dokumen	Rp	121.111.685		
	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	Rp	134.912.825	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20 Dokumen	Rp	121.111.685		
X	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DKUMPP KKR	Persentase Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	Rp	268.539.950	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DKUMPP KKR	Persentase Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	Rp	876.839.950		
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota		DKUMPP KKR	Jumlah Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13 Laporan	Rp	268.539.950	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	Rp	876.839.950		
	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Rp	268.539.950	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DKUMPP KKR	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Rp	876.839.950		
XII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DKUMPP KKR	Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda sah yang berlaku	100%	Rp	152.288.566	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DKUMPP KKR	Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda sah yang berlaku	100%	Rp	145.586.399		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		DKUMPP KKR	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal	550 Unit	Rp	152.288.566	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	DKUMPP KKR	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal	550 Unit	Rp	145.586.399		
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		DKUMPP KKR	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditera ulang	550 Unit	Rp	152.288.566	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	DKUMPP KKR	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditera ulang	550 Unit	Rp	145.586.399		
XIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DKUMPP KKR	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Industri	100%	Rp	67.239.897	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DKUMPP KKR	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Industri	100%	Rp	179.379.359		
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri yang Tersusun	100%	Rp	67.239.897	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri yang Tersusun	100%	Rp	179.379.359		
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 Dokumen	Rp	-	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Dokumen	Rp	107.336.772		
	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Industri dan	1 Dokumen	Rp	67.239.897	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Industri dan	1 Dokumen	Rp	72.042.587		
XX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DKUMPP KKR	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100 %	Rp	147.039.454	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DKUMPP KKR	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100 %	Rp	135.877.288		
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang tersedia	4 Dokumen	Rp	147.039.454	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang tersedia	2 Dokumen	Rp	135.877.288		

	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	Rp 147.039.454	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	DKUMPP KKR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	Rp 135.877.288	
--	---	---------------	---	-----------	----------------	---	---------------	---	-----------	----------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan menampung aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang berasal dari 9 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Khususnya untuk pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, mayoritas usulan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri

Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian ditampung dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan diusulkan pada Tahun 2024.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan dengan hal tersebut telah ditetapkan pula Misi rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 khusus bidang Ekonomi yaitu:

1. Menciptakan bangsa yang berdaya saing.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Berdasarkan kedua misi tersebut maka kerangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara nasional diarahkan pada:

1. Pengembangan UKM yang berbasis IPTEK dan berdaya saing.
2. Memperdayakan koperasi melalui peningkatan posisi tawar dan efisiensi kolektip para anggotanya.
3. Memberdayakan usaha mikro melalui peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Tentu saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota khususnya dinas/instansi yang berperan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Beberapa tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Peningkatan kompetensi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2. Perluasan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Penguatan kelembagaan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5. Perbaikan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Sasaran tersebut meliputi antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan kompetensi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Terwujudnya perluasan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Terciptanya penguatan kelembagaan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Terciptanya perbaikan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Koperasi Tahun Anggaran 2024 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**
 - 1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan.
- 2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**
 - 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Usaha Mikro Tahun Anggaran 2024 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 2 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut:

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- 1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota

- 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
 - 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
 - 1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**
 - 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DKUMPP KKR	100%	Rp 5.282.734.071	APBD		100%	Rp 5.246.773.597
2 17 1 2.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 35.962.823	APBD		100%	Rp 22.852.487
2 17 1 2.10 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	5 Dokumen	Rp 21.815.729	APBD		7 Dokumen	Rp 10.582.903
2 17 1 2.10 06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKUMPP KKR	1 Laporan	Rp 6.940.126	APBD		5 Laporan	Rp 6.271.456
2 17 1 2.10 07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	1 Dokumen	Rp 7.206.968	APBD		1 Laporan	Rp 5.998.128
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 4.672.825.163	APBD		100%	Rp 4.664.353.715
2 17 01 2.02 01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKUMPP KKR	40 orang/bulan	Rp 4.654.713.112	APBD		40 Orang/Bulan	Rp 4.654.713.112
2 17 01 2.02 05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKUMPP KKR	1 Laporan	Rp 11.140.633	APBD		1 Laporan	Rp 5.868.496
2 17 01 2.02 07	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKUMPP KKR	13 Laporan	Rp 6.971.418	APBD		13 Laporan	Rp 3.772.107
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 90.494.068	APBD		100%	Rp 78.115.378
2 17 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKUMPP KKR	12 Paket	Rp 3.644.146	APBD		4 Paket	Rp 3.644.146
2 17 01 2.06 04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKUMPP KKR	12 Paket	Rp 39.527.602	APBD		20 Paket	Rp 31.551.096
2 17 01 2.06 05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKUMPP KKR	12 Dokumen	Rp 8.011.320	APBD		12 Paket	Rp 4.009.136
2 17 01 2.06 06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKUMPP KKR	375 Dokumen	Rp 1.500.000	APBD		375 Dokumen	Rp 1.500.000

2	17	01	2.06	09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKUMPP KKR	119 Laporan	Rp 37.811.000	APBD		50 Laporan	Rp 37.411.000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 392.162.017	APBD		100%	Rp 390.162.017
2	17	01	2.08	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKUMPP KKR	12 Laporan	Rp 89.544.000	APBD		24 Laporan	Rp 89.544.000
2	17	01	2.08	04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKUMPP KKR	12 Laporan	Rp 302.618.017	APBD		55 Laporan	Rp 300.618.017
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 91.290.000	APBD		100%	Rp 91.290.000
2	17	01	2.09	02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKUMPP KKR	17 Unit	Rp 80.570.000	APBD		15 Unit	Rp 80.570.000
2	17	01	2.09	10	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKUMPP KKR	25 Unit	Rp 5.840.000	APBD		8 Unit	Rp 5.840.000
2	17	01	2.09	11	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKUMPP KKR	65 Unit	Rp 4.880.000	APBD		8 Unit	Rp 4.880.000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	DKUMPP KKR	100%	Rp 26.609.398	APBD		100%	Rp 24.345.532
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang dinilai	DKUMPP KKR	100%	Rp 26.609.398	APBD		100%	Rp 24.345.532
2	17	04	2.01	02	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	DKUMPP KKR	10 Unit Usaha	Rp 26.609.398	APBD		10 Unit Usaha	Rp 24.345.532
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	DKUMPP KKR	100%	Rp 19.873.686	APBD		100%	Rp 14.107.465
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	DKUMPP KKR	100%	Rp 19.873.686	APBD		100%	Rp 14.107.465
2	17	05	2.01	05	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	DKUMPP KKR	60 Orang	Rp 19.873.686	APBD		30 Orang	Rp 14.107.465
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DKUMPP KKR	100%	Rp 48.804.445	APBD		100%	Rp 48.037.457
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan perlindungan	DKUMPP KKR	100%	Rp 48.804.445	APBD		100%	Rp 48.037.457
2	17	06	2.01	05	2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	DKUMPP KKR	40 Unit Usaha	Rp 48.804.445	APBD		30 Unit Usaha	Rp 45.637.457

2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang dibina	DKUMPP KKR	100%	Rp 67.694.994	APBD		100%	Rp 61.982.465
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang difasilitasi	DKUMPP KKR	100%	Rp 67.694.994	APBD		100%	Rp 61.982.465
2	17	07	2.01	01	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	DKUMPP KKR	50 Unit Usaha	Rp -	APBD	1 Unit Usaha	Rp 2.400.000
2	17	07	2.01	02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	30 Unit Usaha	Rp 25.000.050	APBD	15 Orang	Rp 19.287.521
2	17	07	2.01	05	3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	DKUMPP KKR	15 Orang	Rp 42.694.944	APBD	50 Unit Usaha	Rp 40.294.944
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	100%	Rp 19.624.963	APBD	100%	Rp 18.424.963
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro yang meningkat	DKUMPP KKR	100%	Rp 19.624.963	APBD	100%	Rp 18.424.963
2	17	08	2.01	01	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	DKUMPP KKR	25 Unit Usaha	Rp 19.624.963	APBD	50 Unit Usaha	Rp 18.424.963
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin	DKUMPP KKR	100%	Rp 134.912.825	APBD	100%	Rp 121.111.685
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang Terdaftar	DKUMPP KKR	100%	Rp 134.912.825	APBD	100%	Rp 121.111.685
3	30	02	2.02	01	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	DKUMPP KKR	36 Dokumen	Rp 134.912.825	APBD	20 Dokumen	Rp 121.111.685
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Lainnya	DKUMPP KKR	100%	Rp 268.539.950	APBD	100%	Rp 876.839.950
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUMPP KKR	100%	Rp 268.539.950	APBD	100%	Rp 876.839.950
3	30	04	2.02	02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DKUMPP KKR	12 Laporan	Rp 268.539.950	APBD	12 Laporan	Rp 876.839.950
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTIP) bertanda syah yang berlaku	DKUMPP KKR	100%	Rp 152.288.566	APBD	100%	Rp 145.586.399
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan	DKUMPP KKR	100%	Rp 152.288.566	APBD	100%	Rp 145.586.399

3	30	06	2.01	01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang berupa kebenaran hasil pengukuran	DKUMPP KKR	550 Unit	Rp 152.288.566	APBD		550 Unit	Rp 145.586.399
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Industri	DKUMPP KKR	100%	Rp 67.239.897	APBD		100%	Rp 179.379.359
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri	DKUMPP KKR	100%	Rp 67.239.897	APBD		100%	Rp 179.379.359
3	31	02	2.01	05	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DKUMPP KKR	2 Dokumen	Rp -	APBD		Dokumen	Rp 107.336.772
3	31	02	2.01	05	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DKUMPP KKR	1 Dokumen	Rp 67.239.897	APBD		1 Dokumen	Rp 72.042.587
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DKUMPP KKR	100%	Rp 147.039.454	APBD		100%	Rp 135.877.288
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jumlah data perusahaan Industri	DKUMPP KKR	100%	Rp 147.039.454	APBD		100%	Rp 135.877.288
3	31	04	2.01	01	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	DKUMPP KKR	4 Dokumen	Rp 147.039.454	APBD		2 Dokumen	Rp 135.877.288

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4,1

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target		Satuan Target	APBD Murni 2024							APBD Pengeseran Terakir							Rencana Perubahan					
			Sebelum Perubahan	Perubahan		DAU Non Earmark	DAU Earmark	Gaji	DAK Fisik	DAK Non Fisik	Total	DAU Non Earmark	DAU Earmark	Gaji	DAK Fisik	DAK Non Fisik	Utang Belanja	Total	DAU Non Earmark	DAU Earmark	Gaji	DAK Fisik	DAK Non Fisik	Utang Belanja	Total
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	Persen	Rp 628.020.959	Rp -	Rp 4.654.713.112	Rp -	Rp -	Rp 5.282.734.071	Rp 592.060.485	Rp -	Rp 4.654.713.112	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.246.773.597	Rp 592.060.485	Rp -	Rp 4.654.713.112	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.246.773.597
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	Persen	Rp 35.962.823	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.962.823	Rp 22.852.487	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.852.487	Rp 22.852.487	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.852.487
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	7	Dokumen	Rp 21.815.729					Rp 21.815.729	Rp 10.582.903						Rp 10.582.903	Rp 10.582.903						Rp 10.582.903
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5	Laporan	Rp 6.940.126					Rp 6.940.126	Rp 6.271.456						Rp 6.271.456	Rp 6.271.456						Rp 6.271.456
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan	Rp 7.206.968					Rp 7.206.968	Rp 5.998.128						Rp 5.998.128	Rp 5.998.128						Rp 5.998.128
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100		Rp 18.112.051	Rp -	Rp 4.654.713.112	Rp -	Rp -	Rp 4.672.825.163	Rp 9.640.603	Rp -	Rp 4.654.713.112	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.664.353.715	Rp 9.640.603	Rp -	Rp 4.654.713.112	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.664.353.715
	1 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	Orang/Bulan		Rp 4.654.713.112				Rp 4.654.713.112		Rp 4.654.713.112					Rp 4.654.713.112		Rp 4.654.713.112					Rp 4.654.713.112
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	Rp 11.140.633					Rp 11.140.633	Rp 5.868.496						Rp 5.868.496	Rp 5.868.496						Rp 5.868.496
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trivulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	1	13	Laporan	Rp 6.971.418					Rp 6.971.418	Rp 3.772.107						Rp 3.772.107	Rp 3.772.107						Rp 3.772.107
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	Persen	Rp 90.494.068	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 90.494.068	Rp 78.115.378	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 78.115.378	Rp 78.115.378	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 78.115.378
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	Paket	Rp 3.644.146					Rp 3.644.146	Rp 3.644.146						Rp 3.644.146	Rp 3.644.146						Rp 3.644.146
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	20	Paket	Rp 39.527.602					Rp 39.527.602	Rp 31.551.096						Rp 31.551.096	Rp 31.551.096						Rp 31.551.096
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	Paket	Rp 8.011.320					Rp 8.011.320	Rp 4.009.136						Rp 4.009.136	Rp 4.009.136						Rp 4.009.136
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	375	Dokumen	Rp 1.500.000					Rp 1.500.000	Rp 1.500.000						Rp 1.500.000	Rp 1.500.000						Rp 1.500.000
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	50	Laporan	Rp 37.811.000					Rp 37.811.000	Rp 37.411.000						Rp 37.411.000	Rp 37.411.000						Rp 37.411.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Persen	Rp 392.162.017	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 392.162.017	Rp 390.162.017	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 390.162.017	Rp 390.162.017	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 390.162.017
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	Laporan	Rp 89.544.000					Rp 89.544.000	Rp 89.544.000						Rp 89.544.000	Rp 89.544.000						Rp 89.544.000
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	55	Laporan	Rp 302.618.017					Rp 302.618.017	Rp 300.618.017						Rp 300.618.017	Rp 300.618.017						Rp 300.618.017
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	Persen	Rp 91.290.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 91.290.000	Rp 91.290.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 91.290.000	Rp 91.290.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 91.290.000
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dihayarkan Pajak dan Perizinannya	17	15	Unit	Rp 80.570.000					Rp 80.570.000	Rp 80.570.000						Rp 80.570.000	Rp 80.570.000						Rp 80.570.000

	3	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	8	Unit	Rp	5.840.000				Rp	5.840.000	Rp	5.840.000									Rp	5.840.000		
	4	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65	8	Unit	Rp	4.880.000				Rp	4.880.000	Rp	4.880.000									Rp	4.880.000		
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	100	100	Persen	Rp	26.609.398	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	26.609.398	Rp	24.345.532	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	24.345.532
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang dinilai	100	100	Persen	Rp	26.609.398	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	26.609.398	Rp	24.345.532	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	24.345.532
	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	50	10	Unit Usaha	Rp	26.609.398					Rp	26.609.398	Rp	24.345.532										Rp	24.345.532	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	100	100	Persen	Rp	19.873.686	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	19.873.686	Rp	14.107.465	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14.107.465
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	100	100	Persen	Rp	19.873.686	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	19.873.686	Rp	14.107.465	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14.107.465
	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Menahami Pengetahuan Perkoperasian	40	30	Orang	Rp	19.873.686					Rp	19.873.686	Rp	14.107.465										Rp	14.107.465	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100	100	Persen	Rp	48.804.445	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	48.804.445	Rp	45.637.457	Rp	-	Rp	2.400.000	Rp	-	Rp	-	Rp	48.837.457
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan perlindungan	100	100	Persen	Rp	48.804.445	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	48.804.445	Rp	45.637.457	Rp	-	Rp	2.400.000	Rp	-	Rp	-	Rp	48.837.457
	1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Menahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	0	10	Orang	Rp	-					Rp	-	Rp	-		2.400.000			Rp	2.400.000	Rp	-		2.400.000	Rp	2.400.000
	2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40	30	Unit Usaha	Rp	48.804.445					Rp	48.804.445	Rp	45.637.457					Rp	45.637.457	Rp	-		45.637.457	Rp	45.637.457
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang dibina	100	100	Persen	Rp	67.694.994	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	67.694.994	Rp	59.582.465	Rp	-	Rp	2.400.000	Rp	-	Rp	-	Rp	61.982.465
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang difasilitasi	100	100	Persen	Rp	67.694.994	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	67.694.994	Rp	59.582.465	Rp	-	Rp	2.400.000	Rp	-	Rp	-	Rp	61.982.465
	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50	1	Unit Usaha							Rp	-	Rp	-		2.400.000			Rp	2.400.000	Rp	-		2.400.000	Rp	2.400.000
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15	15	Orang	Rp	25.000.050					Rp	25.000.050	Rp	19.287.521					Rp	19.287.521	Rp	-		19.287.521	Rp	19.287.521
	3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0	50	Unit Usaha	Rp	42.694.944					Rp	42.694.944	Rp	40.294.944					Rp	40.294.944	Rp	-		40.294.944	Rp	40.294.944
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	100	Persen	Rp	19.624.963	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	19.624.963	Rp	18.424.963	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	18.424.963
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro yang meningkat	100	100	Persen	Rp	19.624.963	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	19.624.963	Rp	18.424.963	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	18.424.963
	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	50	Unit Usaha	Rp	19.624.963					Rp	19.624.963	Rp	18.424.963					Rp	18.424.963	Rp	-		18.424.963	Rp	18.424.963

7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin	100	100	Persen	Rp	134.912.825	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	121.111.685	Rp	121.111.685	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	121.111.685		
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang Terdaftar	100	100	Persen	Rp	134.912.825	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	121.111.685	Rp	121.111.685	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	121.111.685		
	1 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0	20	Dokumen	Rp	134.912.825														Rp	121.111.685	Rp	121.111.685							Rp	121.111.685			
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Lainnya	100	100	Persen	Rp	268.539.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	876.839.950	Rp	876.839.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	876.839.950		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	Persen	Rp	268.539.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	876.839.950	Rp	876.839.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	876.839.950		
	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	12	Laporan	Rp	268.539.950														Rp	876.839.950	Rp	876.839.950							Rp	876.839.950			
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTIP) bertanda syah yang berlaku	100	100	Persen	Rp	152.288.566	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	145.586.399	Rp	145.586.399	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	145.586.399		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan	100	100	Persen	Rp	152.288.566	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	145.586.399	Rp	145.586.399	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	145.586.399		
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang berupa keberanian hasil pengukuran	550	550	Unit	Rp	152.288.566														Rp	145.586.399	Rp	145.586.399							Rp	145.586.399			
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Industri	100	100	Persen	Rp	67.239.897	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	107.336.772	Rp	179.379.359	Rp	72.042.587	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	107.336.772	Rp	179.379.359
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri	100	100	Persen	Rp	67.239.897	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	107.336.772	Rp	179.379.359	Rp	72.042.587	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	107.336.772	Rp	179.379.359
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	Dokumen	Rp	-														Rp	107.336.772	Rp	107.336.772	Rp	-				Rp	107.336.772	Rp	107.336.772		
	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	Dokumen	Rp	67.239.897														Rp	72.042.587	Rp	72.042.587							Rp	72.042.587			
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	100	Persen	Rp	147.039.454	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	135.877.288	Rp	135.877.288	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	135.877.288		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jumlah data perusahaan Industri	100	100	Persen	Rp	147.039.454	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	135.877.288	Rp	135.877.288	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	135.877.288		
	1 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	2	Dokumen	Rp	147.039.454														Rp	135.877.288	Rp	135.877.288							Rp	135.877.288			

Tabel 4.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN	DKUMPP KKR	100%	Rp 5.246.773.597	APBD
2 17 1 2.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 22.852.487	APBD
2 17 1 2.10 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	7 Dokumen	Rp 10.582.903	APBD
2 17 1 2.10 06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKUMPP KKR	5 Laporan	Rp 6.271.456	APBD
2 17 1 2.10 07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	1 Laporan	Rp 5.998.128	APBD
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 4.664.353.715	APBD
2 17 01 2.02 01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKUMPP KKR	40 Orang/Bulan	Rp 4.654.713.112	APBD
2 17 01 2.02 05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKUMPP KKR	1 Laporan	Rp 5.868.496	APBD
2 17 01 2.02 07	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKUMPP KKR	13 Laporan	Rp 3.772.107	APBD
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 78.115.378	APBD
2 17 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKUMPP KKR	4 Paket	Rp 3.644.146	APBD
2 17 01 2.06 04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKUMPP KKR	20 Paket	Rp 31.551.096	APBD
2 17 01 2.06 05	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKUMPP KKR	12 Paket	Rp 4.009.136	APBD
2 17 01 2.06 06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKUMPP KKR	375 Dokumen	Rp 1.500.000	APBD
2 17 01 2.06 09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKUMPP KKR	50 Laporan	Rp 37.411.000	APBD
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 390.162.017	APBD
2 17 01 2.08 02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKUMPP KKR	24 Laporan	Rp 89.544.000	APBD
2 17 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKUMPP KKR	55 Laporan	Rp 300.618.017	APBD
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DKUMPP KKR	100%	Rp 91.290.000	APBD
2 17 01 2.09 02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKUMPP KKR	15 Unit	Rp 80.570.000	APBD
2 17 01 2.09 10	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKUMPP KKR	8 Unit	Rp 5.840.000	APBD
2 17 01 2.09 11	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKUMPP KKR	8 Unit	Rp 4.880.000	APBD
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	DKUMPP KKR	100%	Rp 24.345.532	APBD
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang dinilai	DKUMPP KKR	100%	Rp 24.345.532	APBD
2 17 04 2.01 02	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	DKUMPP KKR	10 Unit Usaha	Rp 24.345.532	APBD
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	DKUMPP KKR	100%	Rp 14.107.465	APBD
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	DKUMPP KKR	100%	Rp 14.107.465	APBD
2 17 05 2.01 05	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	DKUMPP KKR	30 Orang	Rp 14.107.465	APBD

2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DKUMPP KKR	100%	Rp 48.037.457	APBD	
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan perlindungan	DKUMPP KKR	100%	Rp 48.037.457	APBD	
2	17	06	2.01	01	1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	DKUMPP KKR	1 Orang	Rp 2.400.000	APBD
2	17	06	2.01	05	2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	DKUMPP KKR	30 Unit Usaha	Rp 45.637.457	APBD
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang dibina	DKUMPP KKR	100%	Rp 61.982.465	APBD	
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang difasilitasi	DKUMPP KKR	100%	Rp 61.982.465	APBD	
2	17	07	2.01	01	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	DKUMPP KKR	1 Unit Usaha	Rp 2.400.000	APBD
2	17	07	2.01	02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	15 Orang	Rp 19.287.521	APBD
2	17	07	2.01	05	3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	DKUMPP KKR	50 Unit Usaha	Rp 40.294.944	APBD
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DKUMPP KKR	100%	Rp 18.424.963	APBD	
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro yang meningkat	DKUMPP KKR	100%	Rp 18.424.963	APBD	
2	17	08	2.01	01	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	DKUMPP KKR	50 Unit Usaha	Rp 18.424.963	APBD
3	30	02	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang Terdaftar	DKUMPP KKR	100%	Rp 121.111.685	APBD	
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Lainnya	DKUMPP KKR	100%	Rp 876.839.950	APBD	
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUMPP KKR	100%	Rp 876.839.950	APBD	
3	30	04	2.02	02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	DKUMPP KKR	12 Laporan	Rp 876.839.950	APBD
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	DKUMPP KKR	100%	Rp 145.586.399	APBD	
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Tera, Tera ulang dan Pengawasan	DKUMPP KKR	100%	Rp 145.586.399	APBD	
3	30	06	2.01	01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang berupa kebenaran hasil pengukuran	DKUMPP KKR	550 Unit	Rp 145.586.399	APBD
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Industri	DKUMPP KKR	100%	Rp 179.379.359	APBD	
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri	DKUMPP KKR	100%	Rp 179.379.359	APBD	
3	31	02	2.01	05	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DKUMPP KKR	Dokumen	Rp 107.336.772	APBD
3	31	02	2.01	05	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	DKUMPP KKR	1 Dokumen	Rp 72.042.587	APBD
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DKUMPP KKR	100%	Rp 135.877.288	APBD	
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jumlah data perusahaan Industri	DKUMPP KKR	100%	Rp 135.877.288	APBD	
3	31	04	2.01	01	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	DKUMPP KKR	2 Dokumen	Rp 135.877.288	APBD

BAB V

P E N U T U P

A. Catatan Penting

Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya juga mengacu kepada Renstra Nasional Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI serta Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat.

Catatan penting dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah diselenggarakannya program Revitalisasi kelembagaan Koperasi yang terkoordinasi baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten mengingat pada tahun 2012 telah dikeluarkannya UU Nomor 17 Tentang Perkoperasian, sehingga sosialisasi UU tersebut dilakukan secara serempak dirangkaikan dengan kegiatan Revitalisasi kelembagaan guna menyesuaikan kelembagaan koperasi dengan UU dimaksud. Namun dalam perjalanannya pada tanggal 29 mei 2014, UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Pembinaan koperasi kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

B. Kaidah-kaidah Tindak Lanjut

Kaidah-kaidah yang harus disepakati untuk dilaksanakan dalam penjabaran Renja SKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja SKPD dijabarkan dalam bentuk Program dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat optimal serta menyentuh kepentingan bagi masyarakat khususnya gerakan Koperasi dan UMKM.
2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dirangkum dalam bentuk Rencana Strategis dan setiap tahun dituangkan dalam

Renja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Dalam melaksanakan Renja SKPD harus disinkronkan/disesuaikan dengan Rencana Strategis yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Prinsip-prinsip *Good Governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik) harus tetap diterapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain prinsip :
 - *Transparansi* yaitu pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat, dikaji dan dikritik oleh pihak-pihak terkait.
 - *Akuntabilitas* yaitu Segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dalam bentuk laporan/SPJ berdasarkan ketentuan /peraturan yang berlaku.
 - *Demokrasi* yaitu Program dan kegiatan yang dilakukan merupakan aspirasi masyarakat khususnya Gerakan Koperasi dan UMKM yang telah dibahas bersama Pembina Koperasi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Musrenbang.
 - *Profesional* yaitu Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan efisien dan efektif, tepat sasaran, memberikan output dan Outcome yang jelas yang disampaikan melalui tenaga ahli yang menguasai bidangnya sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus diawasi agar tepat sasaran. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengendali Kegiatan dan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

2. Selain melaksanakan program dan kegiatan yang tertera pada DPA, Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memberikan bimbingan teknis kepada Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Kegiatan yang dilaksanakan, namun belum mencapai target pada tahun ini maka harus dilanjutkan pada tahun berikutnya.